



**Pemerintah Provinsi  
Jawa Tengah**

# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)**

# **2022**

**BIRO PEREKONOMIAN  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243  
☎ 024-8311174 ext. 288 Fax. 024-8311183  
✉ [biro.perekonomian6@gmail.com](mailto:biro.perekonomian6@gmail.com)

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
KATA PENGANTAR .....	v
<b>1. BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Kedudukan dan Fungsi .....	1
1.3. Struktur Organisasi .....	3
1.4. Isu - Isu Strategis dan Permasalahan Utama .....	4
1.5. Tindak Lanjut atas LHE Evaluasi Sakip Tahun Lalu .....	4
1.6. Landasan Hukum .....	5
1.7. Sistematika .....	5
<b>2. BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1 Rencana Strategis .....	7
2.2 Perencanaan Kinerja .....	8
2.3 Perjanjian Kinerja .....	9
2.4 Instrumen Pengumpulan Capaian Kinerja.....	10
<b>3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	13
3.2 Analisis Capaian Kinerja.....	14
3.3 Realisasi Anggaran .....	23
<b>4. BAB IV PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan .....	24
4.2 Rekomendasi .....	25

**LAMPIRAN - LAMPIRAN**

Perjanjian Kinerja .....  
RKT .....  
POLICY BRIEF .....

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 : RPJMD.....	7
Tabel 2.2 : RENJA .....	8
Tabel 2.3 : Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 .....	9
Tabel 2.3.1 : Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 .....	14
Tabel 2.3.2 : Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun sebelumnya .....	15
Tabel 2.3.3 : Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target Akhir RPJMD.....	16
Tabel 2.3.4 : Analisis Penyebab Keberhasilan.....	17
Tabel 2.3.5 : Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	17
Tabel 2.3.6 : Analisis Program Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja .....	18
Tabel 3.3 : Capaian Anggaran Program dan Kegiatan.....	23

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah 2022 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

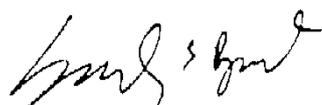
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2022, Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Strategis 2018 – 2023 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 yang telah ditetapkan.

Semarang, Januari 2023

Kepala Biro Perekonomian  
Setda Provinsi Jawa Tengah



**EDDY S BRAMIYANTO, SE, MM**

Pembina Utama Muda

NIP.: 19660611 198602 1 001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal 15 Desember 2016 Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah :

- a. Memberikan informasi kinerja terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai;
- b. Memberikan laporan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;
- c. Sebagai bahan bagi penyempurnaan berbagai kebijakan yang akan diperlukan.

### **1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah berada di bawah Asisten Ekonomi Dan Pembangunan Sekda Provinsi Jawa Tengah yang membantu tugas Asisten Ekonomi dan Pembangunan dalam pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Gubemur di bidang Ekonomi Dan Pembangunan, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN.

Sedangkan Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah itu sendiri, terdiri atas:

1. Bagian Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah;
2. Bagian Badan Usaha Milik Daerah; dan
3. Bagian Perhubungan, Penanaman Modal Dan Pariwisata.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kelola Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Pada pasal 79, Biro Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dan Badan Usaha Milik Daerah serta Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata.

Sedangkan pada pasal 80 Biro Perekonomian mempunyai fungsi :

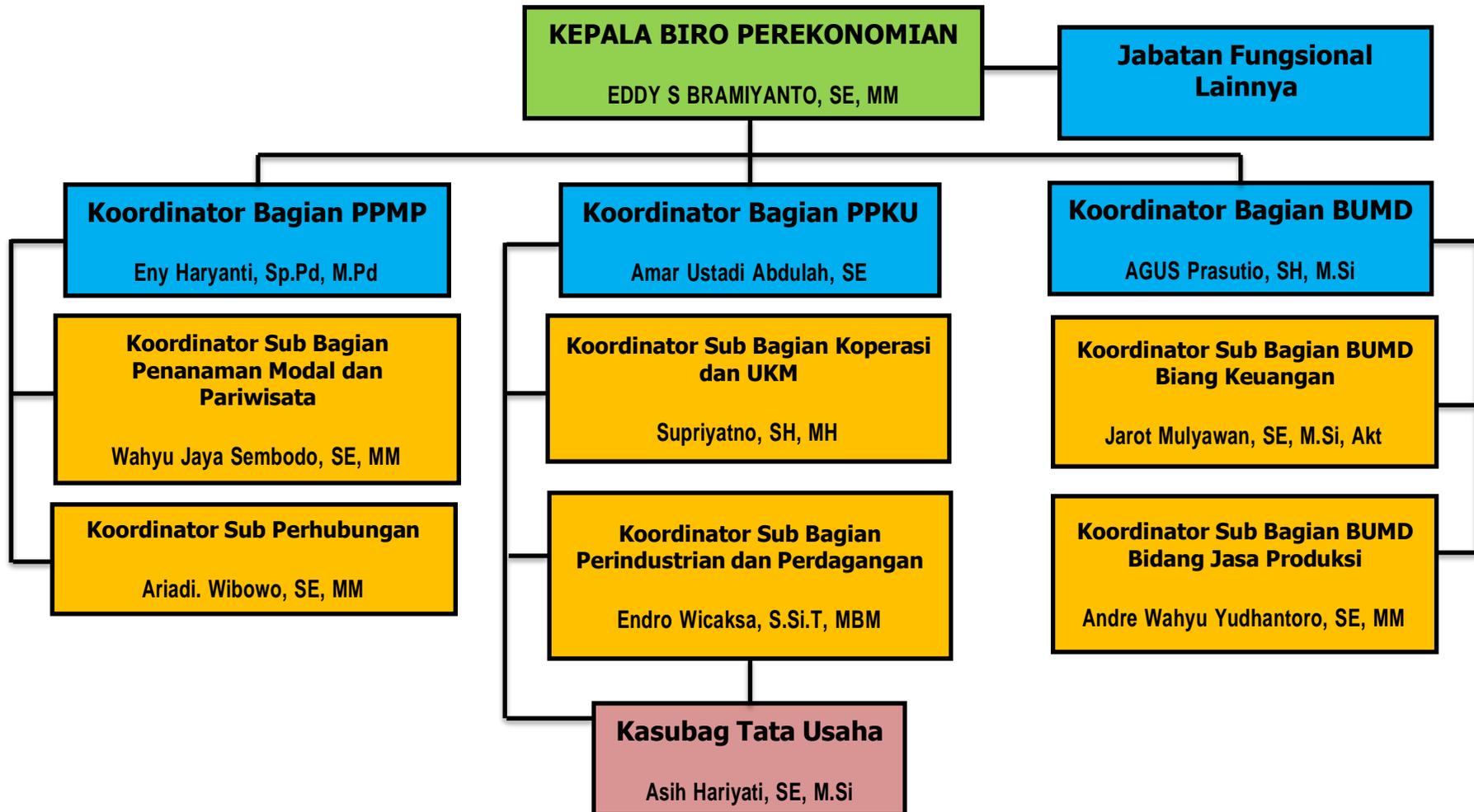
1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan;
4. Pelayanan administrasi dan pembinaan sumber daya ASN;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi Jawa Tengah.

Tahun 2022 sumber daya Aparatur Sipil Negara pada biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah berjumlah 43 pegawai yang terdiri dari :

1. 1 orang Kepala Biro (eselon II);
2. 3 orang Koordinator Bagian;
3. 6 orang Sub Koordinator Sub Bagian
4. 1 orang Kasubag (eselon IV), dan
5. 35 orang pelaksana/fungsional umum.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai struktur organisasi berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

### 1.3 STRUKTUR ORGANISASI BIRO PEREKONOMIAN



Keterangan :

1. PPMP = Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata
2. PPKU = Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
3. BUMD = Badan Usaha Milik Daerah

#### **1.4 Isu - Isu Strategis dan Permasalahan Utama**

Setelah memperhatikan berbagai faktor utamanya faktor-faktor seperti capaian kinerja rencana strategis lima tahun lalu, peluang dan tantangan yang dihadapi, permasalahan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah, telaah terhadap visi dan misi Gubernur, maka Isu - Isu Strategis di lingkungan Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan untuk penyelesaian 5 (lima) tahun ke depan meliputi :

1. Belum optimalnya koordinasi penyusunan kebijakan, pelaksanaan program dan fasilitasi administrasi peningkatan, pengembangan perekonomian daerah dan Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah (BUMD);
2. Terbatasnya kemampuan Lembaga Keuangan Mikro Non Bank, Non Koperasi dan UMKM untuk memenuhi kebutuhan modal usaha maupun melakukan persiapan menuju berbadan hukum
3. Lemahnya akses kepada lembaga permodalan dan promosi pemasaran serta manajemen usaha yang masih sederhana.

#### **1.5 Tindak Lanjut atas LHE Evaluasi Sakip Tahun Lalu**

Dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 yang bertujuan memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah pada Setda Provinsi Jawa Tengah khususnya Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah serta memantau pelaksanaan tindak lanjut saran perbaikan hasil evaluasi pada periode berikutnya.

Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Tahun 2022 pada hasil evaluasi Perencanaan Kinerja tidak terdapat komponen yang harus dievaluasi hanya pada pengendalian ketrcapaian target kinerja tahunan telah dilakukan monitoring dengan menggunakan teknologi informasi melalui aplikasi econrolling namun hasilnya belum digunakan sebagai dasar reward dan punishment bagi unit kerja dan individu.

## **1.6 Landasan Hukum**

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pernerintah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

## **1.7 Sistematika**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

### **BAB II : PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

### **BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, dan ditambahkan solusi kegagalan atau penurunan kinerja sebagai bentuk Rencana Aksi, dari setiap sasaran strategis

#### B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

#### BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

#### LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain - lain yang dianggap perlu.

## **BAB II** **PERENCANAAN KINERJA**

### **2.1. Rencana Strategis**

#### 1. Visi dan Misi

Rencana Starategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun dan disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) sehingga Renstra yang disusun memuat program dan kegiatan tahun 2018 – 2023 sesuai RPJMD Jawa Tengah dimaksud yang sesuai dengan Visi Gubernur Jawa Tengah **“MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI” TETEP MBOTEN KORUPSI, MBOTEN NGAPUSI** dan Misi Gubernur Jawa Tengah :

- a. Membangun masyarakat jawa tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran; dan
- d. Menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan.

#### 2. Tujuan dan Sasaran

Adapun tujuan dan sasaran Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.1  
RPJMD 2018 – 2023  
Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Efektivitas Manajemen	Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah	Persentase rekomendasi kebijakan bidang Perekonomian	80	85	90	93	96

	Pemerintahan Daerah		yang terealisasi					
		Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Perekonomian	85	89	90	93	95
			Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang dievaluasi	100	100	100	100	100

## 2.2. Perencanaan Kinerja

Sesuai Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, t ujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Sekretariat Daerah bidang Perekonomian sebagai berikut :

Tabel 2.2  
Renja 2022

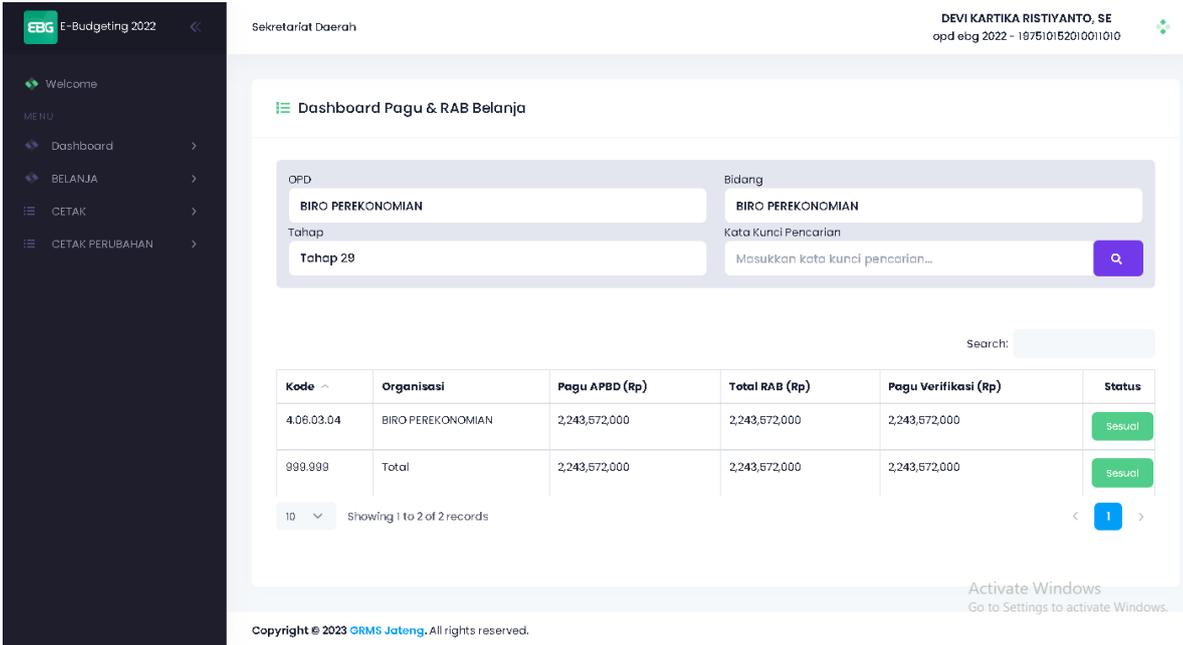
No	Sasaran	Indikator Saaran	Program	Indikator Program	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah	Efektifitas Kebijakan Perekonomian Daerah	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Presentase Rekomendasi Kebijakan Perekonomian Makro yang diusulkan sebagai kebijakan	%	82
				Presentase Rekomendasi Kebijakan Perekonomian Mikro yang diusulkan sebagai kebijakan	%	77
2	Meningkatnya efektifitas akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase kebijakan yang efektif	Meningkatnya laba BUMD	Tingkat kesehatan BUMD Jasa Keuangan	%	80
				Tingkat Kesehatan BUMD Aneka Usaha	%	75
			Meningkatnya kemandirian BLUD	Nilai Kemandirian BLUD	%	50
3	Meningkatnya kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Meningkatkan Kualitas IKM	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Perekonomian	%	100



## 2.4. Instrumen Pengumpulan Capaian Kinerja

Government Resources Management System Provinsi Jawa Tengah atau yang dikenal dengan istilah GRMS merupakan sistem pengelolaan keuangan pemerintah dalam menyokong pelayanan publik dan pembangunan sehingga tercipta monitoring dan evaluasi kinerja birokrasi secara real - time yang salah satunya terdiri atas sistem aplikasi e-budgeting, e-project planning, e-penatausahaan, e-controlling . Aplikasi inilah yang dapat melihat capaian kinerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah dari perencanaan sampai monitoring. Berikut sistem aplikasi dalam Government Resources Management System, sebagai berikut :

1. Sistem e-budgeting adalah sitem yang dikembangkan untuk merencanakan anggran daerah dengan tujuan memberikan panduan dalam proses penyusunan APBD



The screenshot displays the 'E-Budgeting 2022' application interface. The top navigation bar includes the user name 'DEVI KARTIKA RISTIYANTO, SE' and the ID 'opd ebg 2022 - 197510152010011010'. The main content area is titled 'Dashboard Pagu & RAB Belanja'. It features a search filter section with 'OPD' set to 'BIRO PEREKONOMIAN' and 'Bidang' set to 'BIRO PEREKONOMIAN'. Below this is a table with the following data:

Kode	Organisasi	Pagu APBD (Rp)	Total RAB (Rp)	Pagu Verifikasi (Rp)	Status
4.06.03.04	BIRO PEREKONOMIAN	2,243,572,000	2,243,572,000	2,243,572,000	Sesuai!
999.999	Total	2,243,572,000	2,243,572,000	2,243,572,000	Sesuai!

The interface also shows a sidebar menu with options like 'Dashboard', 'BELANJA', 'CETAK', and 'CETAK PERUBAHAN'. At the bottom, there is a copyright notice: 'Copyright © 2023 ORMS Jateng. All rights reserved.' and a Windows activation watermark.

2. Sistem e-project planning adalah system yang dikembangkan untuk menyusun rencana pekerjaan pada setiap kegiatan yang telah dianggarkan.

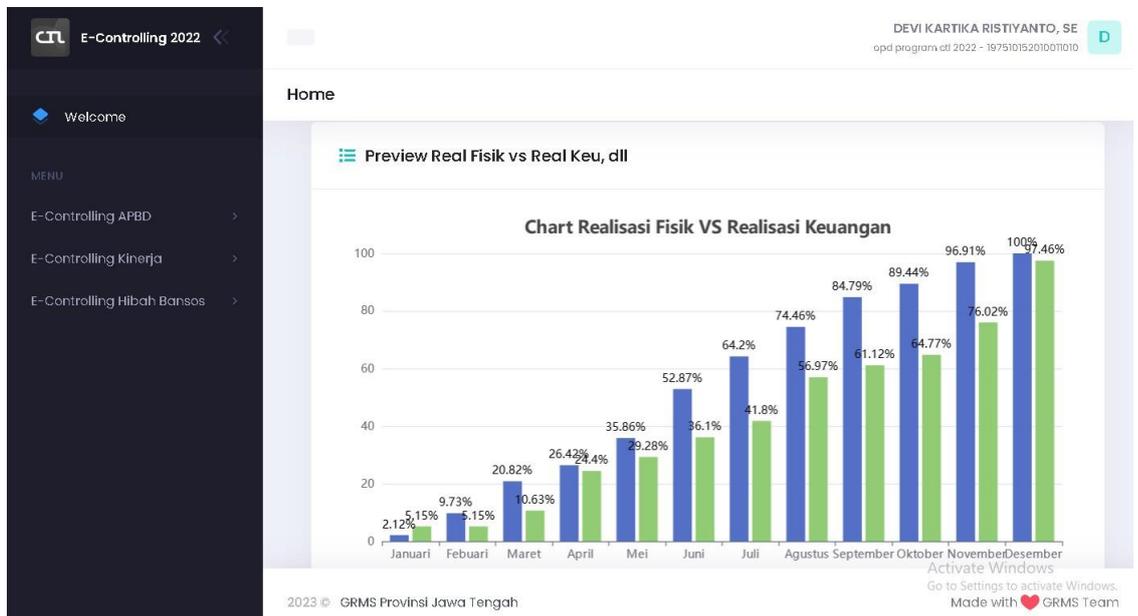
The screenshot displays the 'Rekap Verifikasi Rekening Belanja' (Budget Verification Summary) page. The interface includes a sidebar with 'EPL E-PLANNING', 'Dashboard', 'Nomenklatur Renja', and 'Cetak'. The main content area shows filters for 'Dinas' (Sekretariat Daerah) and 'Bidang' (BIRO PEREKONOMIAN). A table titled 'PROVINSI JAWA TENGAH REKAP VERIFIKASI REKENING BELANJA SEKRETARIAT DAERAH - BIRO PEREKONOMIAN TAHUN 2023' is displayed, showing a breakdown of budget items and their amounts.

Kode Rekening (1)	Uraian Rekening (2)	Jumlah (3)
5	BELANJA DAERAH	3.339.980.000
5.1	BELANJA OPERASI	3.339.980.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.339.980.000
5.1.2.1	Belanja Barang	676.200.000
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis	676.200.000
5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	188.114.000
5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	82.971.000
5.1.2.1.1.27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	670.000
5.1.2.1.1.39	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.200.000
5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	371.855.000
5.1.2.1.1.69	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	247.480.000
5.1.2.2	Belanja Jasa	837.700.000
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor	837.700.000
5.1.2.2.1.3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	776.100.000

3. Sistem e-RKO adalah system yang dikembangkan untuk menentukan target fisik dan target keuangan selama 1 tahun.

The screenshot displays the 'E-RKO 2022' (e-Risk Management) system interface. The sidebar includes 'RKO E-RKO 2022', 'Welcome', 'MENU', 'INPUT', 'CETAK RKO', 'REKAP OPD', and 'DOWNLOAD KERTAS KERJA'. The main content area shows a 'Progres Input Target Fisik dan Keuangan' (Physical and Financial Target Input Progress) section. Two circular progress indicators are shown: 'Target Fisik' and 'Target Keuangan'. Both indicators are currently at 45% completion, represented by green circles. A legend indicates that 0% is 'Belum Sesuai' (Not Suitable) and 45% is 'Sesuai' (Suitable).

4. Sistem e-controlling adalah system ya
5. ng dikembangan dalam menginput capaian kinerja setiap bulannya.



## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1. Capaian Kinerja Organisasi**

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan melaksanakan misi organisasi kepada pihak - pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dan ditetapkan, pengukuran dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Sampai dengan akhir tahun 2022, Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya, ntuk memudahkan interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran dipergunakan interval atau skala nilai sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>KATE GORI</b>	<b>SKOR (%)</b>
<b>1</b>	<b>Sangat Baik</b>	<b>&gt;91</b>
<b>2</b>	<b>Baik</b>	<b>76 – 90,99</b>
<b>3</b>	<b>Cukup</b>	<b>66 – 75,99</b>
<b>4</b>	<b>Kurang</b>	<b>51 – 65,99</b>
<b>5</b>	<b>Sangat Kurang</b>	<b>≤ 50,99</b>

Sesuai Renstra Tahun 2018 - 2023, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, memiliki tujuan "Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah". Untuk mencapai tujuan tersebut, Biro Perekonomian selaku bagian dari Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki 2 (dua) sasaran yaitu ::

1. Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah;
2. Meningkatnya Efektivitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

### 3.2. Analisis Capaian Kinerja

Hingga akhir tahun 2022, Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat, sebagai berikut:

#### 1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah dalam aplikasi e-controlling secara periodik telah melaporkan hasil capaian kinerja setiap bulan dalam 1 (satu) tahun. Biro Perekonomian mempunyai 2 (dua) program dan 6 (enam) indikator kinerja dengan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.2.1  
Perbandingan target dan realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Program/Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Administrasi Umum							
1	Persentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Perekonomian	%	100	100	100	Sangat Baik	Subbag TU
Program Perekonomian Pembangunan							
1	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan	%	80	87,50	109,38	Sangat Baik	Bagian PPMP

2	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan	%	75	75	100	Sangat Baik	Bagian PPKU
3	Tingkat Kesehatan BUMD Jasa Keuangan	%	80	94,59	118,24	Sangat Baik	Bagian BUMD
4	Tingkat Kesehatan BUMD Aneka Usaha	%	75	85,71	114,28	Sangat Baik	Bagian BUMD
5	Nilai kemandirian BLUD	%	50	69,34	138,68	Sangat Baik	Bagian BUMD

Berdasarkan table 3.2.1 diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh indicator kinerja pada Biro Perekonomian realisasi capainnya dikategorikan sangat baik yang dikarenakan seluruh realisasi melampui target yang telah ditetapkan.

**Tabel 3.2.2**  
Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

No	Program/ Indikator Kinerja	2020 (%)			2021 (%)			2022 (%)		
		Target	Real	Cap	Target	Real	Cap	Target	Real	Cap
<b>Program Administrasi Umum</b>										
1	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Perekonomian	100	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>Program Perekonomian Pembangunan</b>										
1	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	80	87,50	109,38
2	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	75	75	100
3	Tingkat Kesehatan BUMD Jasa Keuangan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	80	94,59	118,24
4	Tingkat Kesehatan BUMD Aneka Usaha	NA	NA	NA	NA	NA	NA	75	85,71	114,28

5	Nilai kemandirian BLUD	NA	NA	NA	NA	NA	NA	50	69,34	138,68
---	------------------------	----	----	----	----	----	----	----	-------	--------

Berdasarkan tabel 3.2.2 diatas dapat disimpulkan bahwa, realisasi Kinerja Biro Perekonomian tahun 2020 - 2022 rata – rata capaiannya 100 % , akan tetapi pada indikator kinerja 2022 menggunakan indikator baru yang berbeda dengan tahun sebelumnya.

**Tabel 3.2.3**  
Perbandingan realisasi kinerja dengan target Akhir RPJMD

No	Program	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Akhir 2023	% Capaian	Tingkat Kemajuan
1	Program Administrasi Umum	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Perekonomian	100	100	100	Tercapai
2	Program Perekonomian Pembangunan	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan	87,50	82	87,50	Tercapai
		Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan	75	77	75	Tercapai
		Tingkat Kesehatan BUMD Jasa Keuangan	94,59	85	94,59	Tercapai
		Tingkat Kesehatan BUMD Aneka Usaha	85,71	80	85,71	Tercapai
		Nilai kemandirian BLUD	69,34	55	69,34	Tercapai

Berdasarkan tabel 3.2.3 diatas dapat disimpulkan bahwa, realisasi kinerja Biro Perekonomian Tahun 2022 terhadap Target Akhir RPJMD rata-rata tercapai 100 %. Hal ini dikarenakan, capaian masing-masing indikator sasaran telah tercapai 100 %.

**Tabel 3.2.4**  
**Analisis Penyebab Keberhasilan**

No	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi (%)	% Capaian	Analisis Keberhasilan	Solusi yang Dilakukan
1	Program Administrasi Umum	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Perekonomian	100	100	100	Dikarenakan hanya target 1 dokumen dan tercapai 1 dokumen	-
	Program Perekonomian Pembangunan	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan	80	87,50	109,38	Dokumen kebijakan telah disusun tepat waktu	-
		Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan	75	75	100	Dokumen kebijakan telah disusun tepat waktu	-
		Tingkat Kesehatan BUMD Jasa Keuangan	80	94,59	118,24	Dokumen kebijakan telah disusun tepat waktu	-
		Tingkat Kesehatan BUMD Aneka Usaha	75	85,71	114,28	Dokumen kebijakan telah disusun tepat waktu	-
		Nilai kemandirian BLUD	50	69,34	138,68	Dokumen kebijakan telah disusun tepat waktu	-

Berdasarkan tabel 3.2.4 diatas dapat disimpulkan bahwa, keberhasilan kinerja masing - masing indikator pada Biro Perekonomian Tahun 2022 didukung oleh terlaksananya kegiatan pada tiap - tiap indikator kinerja antara lain tersusunnya dokumen Policy Brief, memfasilitasi sosialisasi kebijakan KUR, pembiayaan bagi UMKM, penguatan peran Lembaga Keuangan Mikro (LKM), mendorong penyaluran kredit bagi koperasi dan UKM, memberikan informasi terkait manajemen LKM, meningkatkan skill pengelola LKM yang professional,

**Tabel 3.2.5**  
**Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

No	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja (%)			Anggaran (Rp)			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian	

1	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Perekonomian	100	100	100	214.980.000	212.384.721	98,79	(1,21)
2	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan	80	87,50	109,38	334.186.000	327.611.500	98,03	(1,97)
3	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan	75	75	100	513.586.000	510.989.068	99,49	(0,51)
4	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	68,33	83,21	121,78	1.180.820.000	1.135.658.411	96,18	(3,82)

Berdasarkan tabel 3.2.5 diatas disimpulkan bahwa capaian realisasi anggaran atas pencapaian 4 indikator kinerja pada tahun 2022 sebesar Rp. 2.186.643.700,- (97,46 %). Capaian realisasi anggaran ini naik 9,34 % dari tahun 2021 sebesar 88,12 %.

Tabel 3.2.6  
Analisis program yang menunjang keberhasilan  
Pencapaian Pernyataan Kinerja

No	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ tidak
1	Program Perekonomian dan pembangunan	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan	109,38	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Prosentase dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi makro	100	Menunjang
		Persentase rekomendasi kebijakan ekonomi	100		Prosentase dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi	100	Menunjang

		an mikro yang diusulkan sebagai kebijakan			mikro		
		Tingkat Kesehatan BUMD Aneka Usaha	114,28	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persentase Dokumen komitmen hasil evaluasi BUMD Aneka Usaha	100	Menunjang
		Tingkat Kesehatan BUMD Jasa Keuangan	118,24		Persentase Dokumen komitmen hasil evaluasi BUMD Jasa Keuangan	100	Menunjang
		Nilai kemandirian BLUD	138,68		Persentase Dokumen komitmen hasil evaluasi BLUD	100	Menunjang

Berdasarkan tabel diatas, capaian Indikator kinerja sasaran didukung oleh beberapa kegiatan sehingga menunjang keberhasilan tiap - tiap indikator sasaran, antara lain:

- a. Persentase jumlah dokumen kebijakan ekonomi makro dicapai melalui kegiatan policy brief yang terdiri dari dengan berbagai judul:
  - 1) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dalam Mendukung Perekonomian Jawa Tengah



## 2) Optimalisasi Integrasi Transportasi di terminal Borobudur



Pada dasarnya Policy Brief yang ada membahas memberikan kemudahan dalam mengakses tujuan dengan harapan pengguna dan aspek keamanan, kenyamanan, keandalan, ketertarikan dan keterjangkauan sehingga memberikan kelancaran dalam perpindahan orang/barang serta keterpaduan intermodal dan antar moda di Kawasan Borobudur sebagai destinasi pariwisata.

b. Persentase jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi mikro dicapai melalui :

1) Pada tahun 2022 kegiatan fasilitasi ekonomi mikro telah dilaksanakan fasilitasi dan koordinasi dengan Bagian Perekonomian, LKM dan UKM dengan hasil berupa kegiatan Rakor dan FGD untuk memfasilitasi sosialisasi kebijakan KUR, sosialisasi pembiayaan bagi UMKM, penguatan peran Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Adapun pelaksanaan kegiatan ini bisa mengidentifikasi data calon debitur potensial KUR kedalam Sistem Informasi Kresit Program (SIKP), mendorong penyaluran kredit bagi koperasi dan UKM, memberikan informasi terkait manajemen LKM, meningkatkan skill pengelola LKM yang profesional sehingga mampu

berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian di daerah dan penanganan kemiskinan ekstrim.

2) Dalam rangka perumusan rekomendasi kebijakan perekonomian Jawa Tengah, pada tahun 2022 dilaksanakan kajian, analisis dan pelaporan terkait kinerja ekonomi makro Jawa Tengah yang meliputi pertumbuhan ekonomi, produk domestik regional bruto (PDRB) perkapitan, inflasi, nilai tukar petani, ekspor-impor, kemiskinan dan pengangguran atas rilis berita resmi statistik yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi Jawa Tengah. Untuk menunjang pelaksanaan kajian dan analisis tersebut dilaksanakan FGD Perekonomian untuk membahas capaian kinerja pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah selama triwulan terakhir serta upaya dan strategi yang dibutuhkan untuk melakukan akselerasi kinerja ekonomi pada triwulan selanjutnya :

- a) High level meeting (HLM) dan rapat koordinasi tim pengendali inflasi daerah atau TPID untuk membahas perkembangan inflasi Jawa Tengah dan upaya strategis yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kota se Jawa Tengah dalam rangka pengendalian harga (utamanya sembako) dipasar sehingga inflasi daerah dapat terkendali;
- b) Rrapat koordinasi terkait upaya mewujudkan persaingan usaha dan kemitraan yang adil di Jawa Tengah;
- c) Rapat koordinasi sektoral membahas isu - isu dan permasalahan ekonomi yang terjadi di Jawa tengah; dan
- d) Monitoring perkembangan ekonomi Jawa Tengah di Kabupaten/Kota (perkembangan harga dan rantai pasok kepokmas, perkembangan kinerja ekonomi sektoral dll). Melalui berbagai kegiatan tersebut disusun rekomendasi kebijakan perekonomian Jawa Tengah terkait upaya percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan upaya pengendalian inflasi daerah yang pada akhirnya akan sangat

berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan dan pengangguran Jawa Tengah.

- c. Persentase jumlah dokumen komitmen hasil evaluasi BUMD Aneka Usaha dan hasil evaluasi BUMD Jasa Keuangan dicapai melalui bahwa setiap triwulan telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi kepada BUMD Bidang keuangan dengan hasil berupa dokumen komitmen dari masing - masing BUMD Bidang Keuangan. Adapun pelaksanaan ini guna menunjang terhadap pencapaian laba BUMD Bidang Keuangan maupun tingkat kesehatan perusahaan. Karena dalam pelaksanaannya Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah memantau dan menelaah secara menyeluruh terhadap kinerja masing - masing BUMD Bidang Keuangan pada sektor pendapatan maupun biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dimana BUMD Bidang Keuangan juga berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian di daerah dan penanganan kemiskinan ekstrim berupa dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang disalurkan kepada masyarakat.
- d. Persentase jumlah dokumen komitmen hasil evaluasi BLUD di capai melalui :
  - 1) Dengan terlaksananya Desk Evaluasi Kinerja dan Monitoring BLUD Provinsi Jawa Tengah sebanyak 3 (tiga) kali di Tahun 2022 yang pesertanya merupakan BLUD Provinsi Jawa Tengah, maka dapat terpantaunya nilai kemandirian BLUD dan capaian kinerja program dan evaluasi kinerja kebijakan BLUD sampai dengan Triwulan I - III tahun 2023 berdasarkan Renstra yang telah ditetapkan. Sehingga dapat tercapai keberhasilan manajemen program dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Nilai Tingkat Kemandirian BLUD.
  - 2) Dengan terlaksananya Rakor tata kelola BLUD maka dapat mendorong peningkatan kinerja BLUD melalui optimalisasi kinerja program yang merupakan capaian kinerja kegiatan serta evaluasi kinerja kebijakan yang merupakan capaian hasil kinerja program yang tertuang dalam rencana bisnis anggaran BLUD, selain hal tersebut, kegiatan ini juga merupakan

fasilitasi upaya pemecahan masalah masing - masing BLUD dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas serta peningkatan pendapatan.

### 3.3. Realisasi anggaran

Perkembangan pelaksanaan belanja operasi dan belanja modal APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

1. Program Administrasi Umum pada Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 214.980.000 dan teralisasi sebesar Rp. 212.384.721 atau 98,79 %;
2. Program Perekonomian dan pembangunan pada :
  - a) Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian dengan anggaran sebesar Rp. 847.772.000 dan teralisasi sebesar Rp. 838.600.568 atau 98,92 %;
  - b) Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD dengan anggaran sebesar Rp. 1.180.820.000 dan teralisasi sebesar Rp. 1.135.658.411 atau 96,18 %.

Pencapaian indikator sasaran Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah menggunakan anggaran sebesar Rp. 2.186.643.700,- atau 97,46 % dari total pagu Rp. 2.243.572.000,-. Sehingga terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar (2,54) % atau sebesar Rp.56.928.300 ,-. Efisiensi ini terdiri dari efisiensi jasa konsultan.

Tabel 3.3  
Tabel Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	214.989.000	212.384.721	98,79
2	Program Perekonomian Pembangunan	2.028.592.000	1.974.258.979	97,32
	Jumlah	2.243.572.000	2.186.643.700	97,46

## **BAB IV P E N U T U P**

### **4.1. Kesimpulan**

Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dan Badan Usaha Milik Daerah serta Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata dan berfungsi untuk memberikan pelayanan di bidang pemerintahan pada masyarakat.

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin.

Berdasarkan hasil evaluasi, capaian indikator kinerja sasaran tahun sebelumnya, maka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Biro Perekonomian dikategorikan pencapaian kerjanya SANGAT BAIK sebagaimana olah data

Berdasarkan hasil pengukuran masing-masing capaian indikator kinerja Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan dengan capaian 109,38 %, Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan dengan capaian 100 %, Tingkat Kesehatan BUMD Jasa Keuangan dengan capaian 118,24 %, Tingkat Kesehatan BUMD Aneka Usaha dengan capaian 114,28 % dan Nilai kemandirian BLUD dengan capaian 138,68 %. Hasil capaian realisasi anggaran Sangat Baik sebesar 97,46%.

Beberapa isu strategis Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan dalam penyelesaian untuk 5 (lima) tahun ke depan yakni :

1. Belum optimalnya koordinasi penyusunan kebijakan, pelaksanaan program dan fasilitasi administrasi peningkatan, pengembangan perekonomian daerah dan Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah (BUMD);
2. Terbatasnya kemampuan Lembaga Keuangan Mikro Non Bank, Non Koperasi dan UMKM untuk memenuhi kebutuhan modal usaha maupun melakukan persiapan menuju berbadan hukum;
3. Lemahnya akses kepada lembaga permodalan dan promosi pemasaran serta manajemen usaha yang masih sederhana.

#### **4.2. Rekomendasi**

Beberapa langkah atau strategi yang dilaksanakan dalam perbaikan kinerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah untuk kedepannya akan lebih mengoptimalkan fungsi perencanaan anggaran dan pengendalian internal serta meningkatkan koordinasi dengan pihak - pihak terkait untuk perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan yang lebih baik.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah semoga dapat menjadi bahan pertimbangan / evaluasi untuk kegiatan / kinerja yang akan datang.